

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Di Indonesia sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan terutama untuk masyarakat menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor utama yang membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak sekalipun hanya sekolah dasar. Padahal pendidikan merupakan sektor penting yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Anak-anak jalanan dan tidak mampu ini dalam kehidupan sehari-hari harus bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Anak-anak ini harus kehilangan haknya untuk bersekolah dan bermain bersama teman sebayanya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan selayaknya dunia anak, dan terpaksa harus pula meninggalkan cita-citanya dengan bekerja.

Adapun orang tua mereka tidak mampu memikul biaya-biaya untuk membeli buku, pakaian seragam dan keperluan sekolah lainnya. Anak-anak ini juga beresiko untuk bertumbuh sebagai orang-orang yang berpendidikan rendah bahkan buta huruf sehingga kemungkinan besar mereka menjadi orang-orang miskin masa depan dan akan menjadi generasi yang hilang (lost generation) yang tidak pernah terlepas dari masalah seperti kekurangan gizi, pelacuran usia dini yang sangat rentan dengan HIV /

AIDS serta tindak kriminalitas. Untuk mengatasi ledakan anak putus sekolah atau paling tidak untuk mengatasi masalah sosial yang mungkin akan timbul perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu non formal dan pendidikan informal.

Salah satunya dengan pendidikan kesetaraan, Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu dari pendidikan non formal adalah program yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C. Penyetaraan hasil belajar pendidikan kesetaraan diatur oleh Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas 20/2003: "Pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: "Pendidikan Non Formal, dikelola pada masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang menjadi pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal pada rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat." Oong Komar (2006:205), sifat penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan non formal berbeda dengan jalur pendidikan sekolah, ciri utama yang membedakannya adalah keluwesan penyelenggaraan pendidikan yang berkenan pada waktu

atau lama belajar, serta usia peserta didik, isi pelajaran, dengan penyelenggaraan pengajaran atau penilaian hasil belajar. Pendidikan non formal memiliki waktu yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan jalur pendidikan formal, waktunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar.

Usia peserta didik juga tidak memiliki batasan yang khusus, usia peserta didik saat mengikuti sistem pendidikan bervariasi dari yang muda sampai yang tua. Pendidikan non formal sebagai sebuah bagian dari sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan dan implementasi belajar sepanjang hayat. Menurut pendapat Saleh Marzuki (2012:141), tugas pendidikan non formal adalah: (1) sebagai persiapan memasuki dunia sekolah; (2) sebagai suplemen dan penambah pelajaran karena mata pelajaran yang dilakukan di sekolah terbatas; (3) sebagai perlengkapan pada peserta yang dididik karena kecakapan tertentu memang belum diajarkan pada sekolah namun dapat dipandang perlu, sementara kurikulum di sekolah tidak mampu menampungnya; (4) sebagai pengganti (substitusi) karena anak-anak yang tidak pernah sekolah yang harus memperoleh kecakapan sama atau setara dengan sekolah¹.

Pada informasi ini dapat dikatakan bahwa begitu pentingnya pendidikan berbasis masyarakat untuk mendukung tercapainya implementasi pendidikan untuk semua kalangan masyarakat dan juga menjadi wadah dalam memenuhi kekurangan dari pendidikan formal, salah satunya adalah PKBM

¹ Marzuki, Saleh. 2012. Pendidikan Nonformal. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Pentingnya keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dalam pembelajaran berupaya untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan peserta didik dengan mengakomodasinya melalui pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Mengetahui dan menyadari kebutuhan dan segala hal yang diinginkannya dari pada pemerintah yang mungkin menyelenggarakan pendidikan yang seragam dan beorientasi pada kepentingan tertentu. Namun perlu disadari pula bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada akan eksis dan berjalan dengan baik manakala masyarakat tersebut memiliki kesadaran dan berdaya dalam menyelenggarakan pendidikannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menjalin relasi dalam arti hanya sebagai mitra bukan memberikan intervensinya terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada.

Dari sekian banyak kelompok belajar yang berpartisipasi dalam menerapkan pendidikan berbasis masyarakat, salah satunya adalah PKBM Generasi Juara yang merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang digunakan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Manajemen PKBM yang baik, sangat diperlukan agar semua aktivitas dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Hal yang menjadi masalah pokok dalam manajemen PKBM Generasi Juara Depok yakni Manajemen belum memiliki kreativitas dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Beberapa contoh manajemen yang belum memiliki kreativitas yang tinggi yaitu dimana kurangnya inovasi pada pengembangan program; tidak memiliki prosedur penetapan kurikulum; tidak memiliki model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik wilayah; kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; tidak memiliki pedoman sistem pembinaan internal; belum ada kemitraan dengan pihak Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI); terkesan kurang mandiri karena untuk membiayai program masih bergantung kepada bantuan pemerintah.

Manajemen PKBM seperti ini hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal. Manajemen yang diharapkan adalah manajemen yang memiliki perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, terdapatnya jalinan komunikasi dan pemberian motivasi kerja yang kontinu, sistem pengawasan yang baik dan dilakukan evaluasi, sehingga akan jelas tingkat tercapainya program dan kegiatan yang dilaksanakan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “ Manajemen PKBM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Manajemen PKBM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara Depok?

2. Apa saja kesulitan pelaksanaan Manajemen PKBM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara Depok?
3. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan Manajemen PKBM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara Depok?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen PKBM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara Depok
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Manajemen di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara Depok
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan Manajemen PKBM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara Depok

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahasan keilmuan terhadap Manajemen PKBM di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Juara Depok
2. Secara praktis Memberikan masukan bagi proses penyelenggaraan lembaga pendidikan non formal dan memberikan pemahaman lembaga

pendidikan non formal supaya terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan menjadi semakin baik